

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN
PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK
PERSEROAN TERBUKA

A. CONTOH FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI
HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

NAMA WAJIB PAJAK : (1)
NPWP : (2)
TAHUN PAJAK : (3)

No	Akhir Bulan	Pemegang Saham		Hubungan Kepemilikan Saham	Pengendalian	Jumlah Kepemilikan Saham	Persentase
		Nama	NPWP				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

..... (12)
Wajib Pajak,

.....(13)



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI
HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (3) Diisi dengan Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan bulan.
- (6) Diisi dengan nama pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham.
- (8) Diisi dengan bentuk hubungan istimewa pemegang saham dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (9) Diisi dengan jenis pengendalian berupa pengendalian secara langsung atau tidak langsung.
- (10) Diisi dengan jumlah kepemilikan saham.
- (11) Diisi dengan persentase kepemilikan saham.
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- (13) Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)

Tahun:..... (3)

Posisi Akhir Bulan														Jumlah Hari Memenuhi syarat	
Bulan	Modal		Pemegang Saham Dengan Kepemilikan >=5%				Pemegang Saham Dengan Kepemilikan <5%					% Total Memenuhi Syarat			
			Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali		Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	Pemegang Saham Lainnya		Pemegang Saham Pengendali		Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	Pemegang Saham Sebagai Pihak				
	Dasar (saham)	Disetor (saham)	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham		Jumlah Pemegang saham	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang saham	Jumlah Saham		Jumlah Pemegang saham		Jumlah Saham	Bulan Ini	Total s.d. Bulan Ini
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Januari															
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															

....., (20)

Wajib Pajak,

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (3) Diisi dengan Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan.
- (4) Diisi dengan bulan.
- (5) Diisi dengan jumlah saham yang menjadi modal dasar.
- (6) Diisi dengan jumlah saham disetor.
- (7) Diisi dengan jumlah pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali yang memiliki saham dengan kepemilikan paling sedikit 5% (lima persen).
- (8) Diisi dengan total jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali dengan kepemilikan paling sedikit 5% (lima persen) bagi masing-masing pemegang saham.
- (9) Diisi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali dengan kepemilikan paling sedikit 5% (lima persen).
- (10) Diisi dengan jumlah pemegang saham lainnya yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen).
- (11) Diisi dengan total jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya dengan kepemilikan paling sedikit 5% (lima persen) bagi masing-masing pemegang saham.
- (12) Diisi dengan jumlah pemegang saham pengendali yang memiliki saham kurang dari 5% (lima persen).
- (13) Diisi dengan total jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen) bagi masing-masing pemegang saham.
- (14) Diisi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen).
- (15) Diisi dengan jumlah pemegang saham yang termasuk Pihak dengan kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tidak termasuk Pihak pada angka (12)).
- (16) Diisi dengan total jumlah saham yang dimiliki oleh Pihak dengan kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tidak termasuk jumlah saham pada angka (13) dan (14)).
- (17) Diisi dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh Pihak (total jumlah saham yang dimiliki oleh Pihak (pada angka (16)) dibandingkan dengan jumlah saham disetor (pada angka (6))).
- (18) Diisi dengan jumlah hari dalam bulan sebagaimana angka (1) dimana persentase jumlah saham sebagaimana angka (17) memenuhi syarat.
- (19) Diisi dengan akumulasi jumlah hari sampai dengan akhir bulan sebagaimana angka (1) yang memenuhi syarat.
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- (21) Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak.



C. CONTOH FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

TAHUN PAJAK: (1)

NO	NAMA WAJIB PAJAK/EMITEN/PERUSAHAAN PUBLIK	NPWP	NAMA BIRO ADMINISTRASI EFEK	NPWP	JUMLAH PIHAK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%	JUMLAH HARI DALAM SATU TAHUN PAJAK YANG DIPENUHI	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK
YANG MEMENUHI SYARAT

- (1) Diisi dengan Tahun Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor urut.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat.
- (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (5) Diisi dengan nama Biro Administrasi Efek yang melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek.
- (7) Diisi dengan jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a.
- (8) Diisi dengan persentase dari kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a atas seluruh saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.
- (9) Diisi dengan jumlah hari dipenuhinya persyaratan.
- (10) Diisi dengan keterangan lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.p.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Dewi Suriani Haslam

NIP 198501162010122002